



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

2016

<https://mitr.kab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik
Kabupaten Minahasa Selatan



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

2016

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2016

ISBN	978-602-5494-36-9
Nomor Publikasi	71050.1741
Katalog BPS	4102004.7109
Ukuran Buku	18 X 25 cm
Jumlah Halaman	ix + 61 halaman

Naskah

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit

Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh

Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Program pemerintah pada hakekatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Karena masyarakat adalah subjek sekaligus menjadi objek pembangunan. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk melihat seberapa jauh pencapaian program pembangunan dalam wacana kesejahteraan rakyat, maka BPS Kabupaten Minahasa Selatan sebagai penyedia data, menerbitkan publikasi berjudul **Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Minahasa Tenggara 2016**.

Publikasi ini menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Minahasa Tenggara antar waktu, dan melihat perbandingan antar kabupaten/kota. Data untuk analisis indikator kesejahteraan rakyat bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret Tahun 2016.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini, disampaikan terima kasih.

Minahasa Selatan, 30 November 2017
Kepala BPS Kab. Minahasa Selatan



Ferdinand Didi Terok, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
1. KEPENDUDUKAN	1
1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin	1
1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	4
1.3 Angka Beban Ketergantungan	5
1.4 Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama	8
1.5 Penggunaan Alat/Cara KB	10
2. KESEHATAN DAN GIZI	13
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	13
2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita	14
2.3 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	16
3. PENDIDIKAN	21
3.1 Angka Melek Huruf (AMH)	22
3.2 Rata-rata Lama Sekolah	25
3.3 Tingkat Pendidikan	26
3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah (APS, APK, dan APM)	27
4. KETENAGAKERJAAN	31
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	31
4.2 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan	33

4.3	Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	34
4.4	Jumlah Jam Kerja	36
5.	TARAF DAN POLA KONSUMSI	39
5.1	Pengeluaran Rumah Tangga	39
5.2	Konsumsi Kalori dan Protein	42
6.	PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	45
6.1	Kualitas Rumah Tinggal	45
6.2	Fasilitas Rumah Tinggal	48
6.3	Status Kepemilikan Rumah Tinggal	50
7.	KEMISKINAN	53
7.1	Perkembangan Kemiskinan	54
7.2	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	55
8.	SOSIAL LAINNYA	57
8.1	Perjalanan Wisata	58
8.2	Akses pada Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	59
8.3	Kredit usaha	60
8.4	Tindak Kejahatan	61

DAFTAR TABEL

Halaman

KEPENDUDUKAN

- | | | |
|-----|--|----|
| 1.1 | Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara | 3 |
| 1.2 | Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara Menurut Kecamatan, 2016 | 5 |
| 1.3 | Wanita Usia 15-49 tahun Pengguna Alat/Cara KB (persen), 2015 – 2016 | 11 |

KESEHATAN DAN GIZI

- | | | |
|-----|--|----|
| 2.1 | Penduduk yang Berobat Jalan berdasarkan Lokasi Berobat, 2016 | 19 |
|-----|--|----|

PENDIDIKAN

- | | | |
|-----|---|----|
| 3.1 | Penduduk 15 tahun keatas per Jenis Kelamin Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki (persen), 2016 | 26 |
| 3.2 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah, 2016 | 28 |
| 3.3 | Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan, 2016 | 29 |
| 3.4 | Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan, 2016 | 29 |

KETENAGAKERJAAN

- | | | |
|-----|---|----|
| 4.1 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2014 - 2015 | 32 |
| 4.2 | Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha (persen), 2015 | 34 |

TARAF DAN POLA KONSUMSI

- 5.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita menurut Jenis Pengeluaran, 2015-2016 40

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

- 6.1 Rumahtangga menurut Indikator Kualitas Perumahan (persen), 2016 46
- 6.2 Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Untuk Minum (persen), 2016 49
- 6.3 Tabel Indikator Perumahan Kabupaten Kabupaten Minahasa Tenggara, 2016 50

KEMISKINAN

- 7.1 Perkembangan Kemiskinan menurut Indikator di Kabupaten Minahasa Tenggara, 2012 – 2016 55

SOSIAL LAINNYA

- 8.1 Penduduk per Jenis Kelamin yang Bepergian untuk Wisata (persen), 2016 58
- 8.2 Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha (persen), 2016 60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Komposisi Luas Kota dan Luas Kecamatan di Kabupaten Kabupaten Minahasa Tenggara, 2016	4
1.2 Komposisi Penduduk Kabupaten Kabupaten Minahasa Tenggara (persen), 2011-2016	6
1.3 Angka Beban Ketergantungan, 2011 – 2016	7
1.4 Persentase Perempuan Umur 10 Tahun Ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama, 2016	11
2.1 Rata-rata Lama Sakit per Kabupaten/Kota di Kabupaten Minahasa Tenggara, 2016	14
2.2 Lama Pemberian ASI (Bulan), 2016	15
2.3 Balita yang Pernah Mendapatkan Imunisasi (persen), 2016	16
2.4 Komposisi Penolong Persalinan Bayi di Kabupaten Minahasa Tenggara (persen), 2016	17
3.1 Angka Melek Huruf, 2016	23
3.2 Harapan Lama Sekolah, 2011-2016	24
3.3 Rata-rata Lama Sekolah, 2011-2016	25
4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan (persen), 2015	33
4.2 Komposisi Status Pekerjaan Penduduk yang Bekerja (persen), 2015	35
4.3 Penduduk yang Bekerja menurut Jam Kerja, 2015	36
5.1 <i>Gini Ratio</i> menurut Kabupaten/Kota, 2016	42
5.2 Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara, 2015	43

6.1	Rumahtangga yang Menurut Status Kepemilikan Bangunan yang Ditempati (persen), 2016	51
7.1	Persentase Penduduk Miskin, 2012-2016	54
8.1	Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki HP (persen), 2016	59

<https://mitrakab.bps.go.id>

1. KEPENDUDUKAN



Masalah kependudukan meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan bila kualitasnya baik, namun sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan bila kualitasnya rendah. Kualitas penduduk dapat ditingkatkan dengan peningkatan kebutuhan pangan, sandang, papan, dan pendidikan, kesehatan yang layak seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Seperti diketahui bersama bahwa hampir semua rencana pembangunan perlu ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran dan susunannya menurut kelompok umur penduduk yang relevan dengan rencana tersebut. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, dalam menangani permasalahan penduduk pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Disamping itu program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

1.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk berkaitan erat dengan laju pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun, otomatis akan meningkatkan jumlah penduduk secara pesat. Tingkat pertumbuhan yang tinggi pada daerah yang belum maju dapat menimbulkan permasalahan. Pertumbuhan penduduk tinggi yang disumbangkan oleh penambahan jumlah penduduk usia muda yang belum produktif menjadi beban perekonomian

secara makro dan menjadi beban rumah tangga secara mikro. Sedangkan pertumbuhan penduduk tinggi yang disumbangkan oleh penambahan jumlah penduduk usia muda yang produktif biasanya karena faktor banyaknya migrasi pencari kerja yang masuk juga tentu akan menimbulkan masalah sosial baru di suatu daerah.

Saat ini Kabupaten Minahasa Tenggara menempati peringkat 9 dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data proyeksi penduduk tahun 2010 – 2035, jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 105.163 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami kenaikan sebanyak 627 jiwa dibandingkan dengan tahun 2015. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara meningkat sebanyak 4.452 jiwa, atau naik sekitar 4,42 persen.

Semenjak tahun 2010 hingga 2016, secara absolut, jumlah penduduk terus bertambah namun laju pertumbuhannya relatif mengalami penurunan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara sudah dibawah 1 persen, tergolong cukup kecil dibandingkan daerah lain atau rata-rata nasional. Penurunan laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan keberhasilan program Keluarga Berencana dimana program ini ditujukan untuk menekan angka kelahiran, menciptakan norma keluarga kecil sehingga terbuka peluang bagi suatu keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarganya.

Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju pertumbuhan
(1)	(2)	(3)
2010	100.711	0,80
2011	101.516	0,86
2012	102.394	0,71
2013	103.129	0,67
2014	103.818	0,69
2015	104.536	0,60
2016	105.163	

Sumber : Proyeksi Penduduk

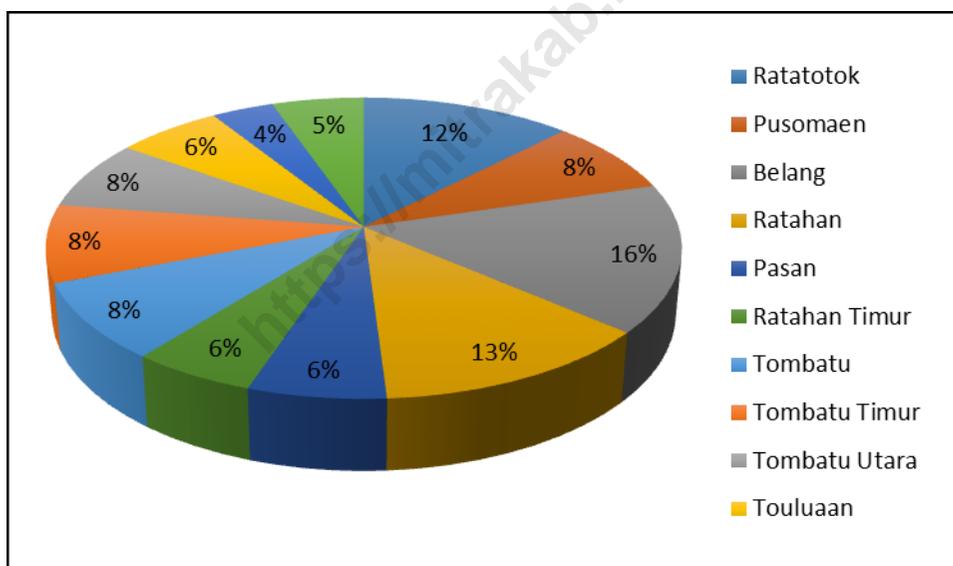
Dengan jumlah penduduk yang relatif besar, permasalahan kependudukan di Kabupaten Minahasa Tenggara perlu mendapat perhatian yang serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinergi dengan program-program pembangunan lainnya yang sedang dan akan dilaksanakan.

Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, *sex ratio* di Kabupaten Minahasa Tenggara tercatat sebesar 107,53. Nilai *sex ratio* Minahasa Tenggara yang di atas 100 menyatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan, dimana dari 100 penduduk perempuan terdapat 107 - 108 penduduk laki-laki. Secara keseluruhan, pada setiap kecamatan, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan, hal ini terlihat *sex ratio* tertinggi adalah Kecamatan Touluaan Selatan, yaitu 110,48 dan *sex ratio* terendah adalah Kecamatan Pasan, yaitu 104,53.

1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan yang dihadapi terkait penduduk adalah ketimpangan distribusi atau persebaran penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Di sisi lain, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan dengan persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya jumlah lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk permukiman, serta tidak memadainya akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta masalah sosial lainnya.

Gambar 1.1. Komposisi Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara, 2016



Sumber: Minahasa Tenggara dalam Angka 2016

Persebaran penduduk antara kabupaten dan kota tampak masih timpang, sehingga kepadatannya masih belum merata. Kepadatan penduduk biasanya terpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga mengundang penduduk wilayah pedesaan untuk bekerja atau bertempat tinggal di daerah perkotaan.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Minahasa Tenggara 143,94. Artinya terdapat 143 sampai 144 jiwa di setiap Km². Daerah yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Tombatu Timur, dimana setiap km² dihuni sekitar 466 jiwa. Terpadat kedua adalah Kecamatan Belang, dimana setiap km² dihuni sekitar 223 jiwa. Sementara daerah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Touluaan, dimana di kecamatan tersebut setiap km² wilayahnya dihuni sekitar 63 jiwa.

Tabel 1.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara Menurut Kecamatan, 2016

Kode	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk per Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ratatotok	10.418	12.941	124,22
2.	Pusomaen	5.362	8.447	157,53
3.	Belang	7.517	16.778	223,2
4.	Ratahan	6.163	13.352	216,65
5.	Pasan	4.979	6.498	130,51
6.	Ratahan Timur	6.399	5.849	91,4
7.	Tombatu	6.795	8.772	129,09
8.	Tombatu Timur	1.881	8.782	466,88
9.	Tombatu Utara	3.717	7.793	209,66
10.	Touluaan	10.180	6.499	63,84
11.	Touluaan Selatan	5.276	3.816	72,33
12.	Silian Raya	4.375	5.636	128,82
Kabupaten Minahasa Tenggara		73.062	105.163	143,94

Sumber: Minahasa Tenggara dalam Angka 2016

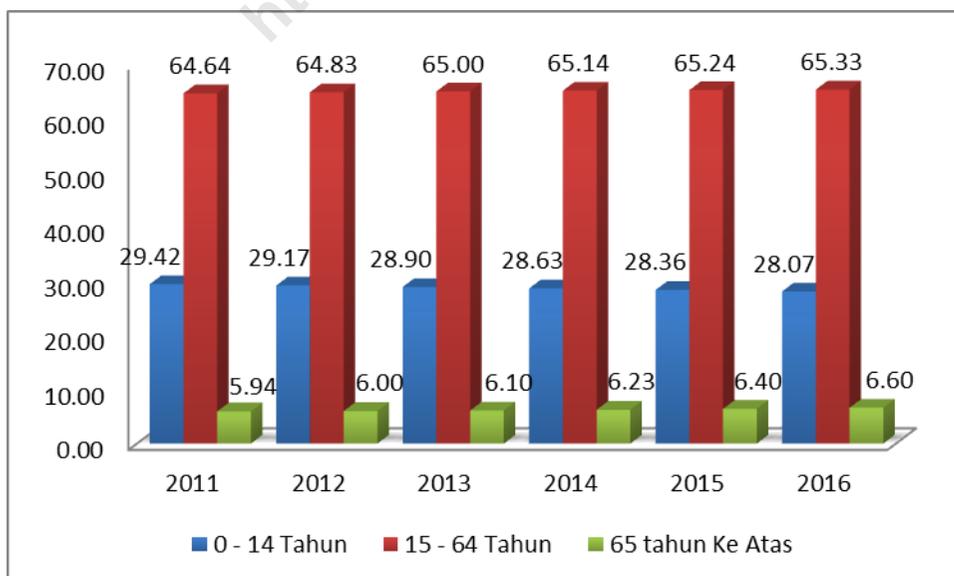
1.3. Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus di tanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk

yang belum/tidak produktif lagi. Sebaliknya, persentase angka beban ketergantungan semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum/tidak produktif.

Gambar 1.3 menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara menurut tiga kelompok umur yakni kelompok umur produktif (15-64 tahun), kelompok umur belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif (65 tahun ke atas). Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016, Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki penduduk usia muda sekitar 28,07 persen, penduduk usia produktif 65,33 persen, dan penduduk usia lanjut 6,60 persen. Selama periode 2011-2016 telah terjadi peningkatan komposisi penduduk usia lanjut, dan dikenal dengan istilah proses penuaan (*aging process*) atau proses transisi umur dari penduduk muda ke penduduk tua, dan selama periode 2011-2016 terjadi penurunan jumlah penduduk usia muda serta penambahan proporsi penduduk usia produktif.

Gambar 1.2 Komposisi Penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara (persen), 2011-2016

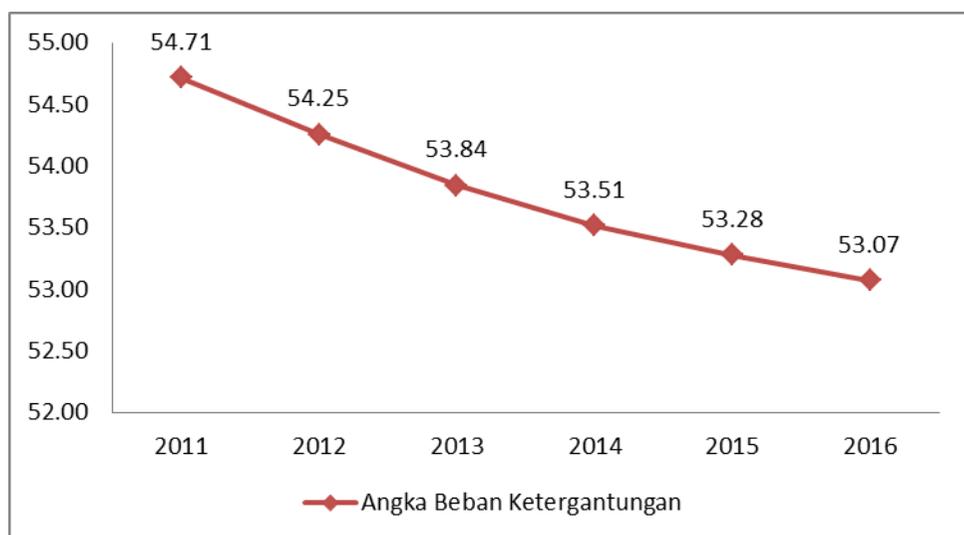


Sumber : Proyeksi Penduduk

Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa dampak keberhasilan pembangunan kependudukan dapat dilihat dari angka beban ketergantungan yang semakin mengecil. Pada tahun 2016 angka beban ketergantungan sebesar 53,07, berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 53 sampai 54 penduduk usia tidak produktif. Hal ini dapat menjadi sinyal yang baik untuk pemerintah setempat memaksimalkan penduduk usia kerja. Bila proporsi penduduk usia tidak produktif semakin rendah (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih) maka angka beban ketergantungan akan semakin rendah. Semakin rendah angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya dan keturunannya dengan adanya investasi *human capital* maupun *saving*.

Tren angka beban ketergantungan 2011-2016 Kabupaten Minahasa Tenggara terlihat ke arah penurunan dari 54,71 di tahun 2011 menjadi 53,07 di tahun 2016. Angka beban ketergantungan antara 51 - 69 merupakan indikasi bahwa suatu daerah masih berada pada periode jendela peluang (*windows of opportunity*).

Gambar 1.3. Angka Beban Ketergantungan, 2011-2016



Sumber : Susenas 2016

Pada periode pendek tersebut diperoleh adanya bonus demografi yakni keuntungan ekonomis akibat adanya peningkatan proporsi penduduk usia produktif sehingga setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung 50 penduduk usia tidak produktif atau perbandingannya hanya setengahnya. Ilustrasinya, dalam suatu rumah tangga terdapat 2 anggota rumah tangga usia produktif (misalnya ayah dan ibu) dan satu anggota rumah tangga yang tidak produktif, anak dibawah 15 tahun misalnya. Bayangkan jika terdapat kesempatan kerja yang juga cukup untuk menampung mereka, maka akan terjadi kelebihan kemampuan memenuhi kebutuhannya sehingga ada kemampuan bagi rumah tangga untuk melakukan *saving* atau melakukan investasi *human capital* yang lebih tinggi baik bagi kedua orang tua pada ilustrasi tadi ataupun bagi anaknya. Investasi *human capital* misalnya dengan menyekolahkan pada jenjang yang lebih tinggi, ataupun meningkatkan kemampuan tambahan misalnya melalui kursus dan lain-lain.

1.4. Wanita menurut Usia Perkawinan Pertama

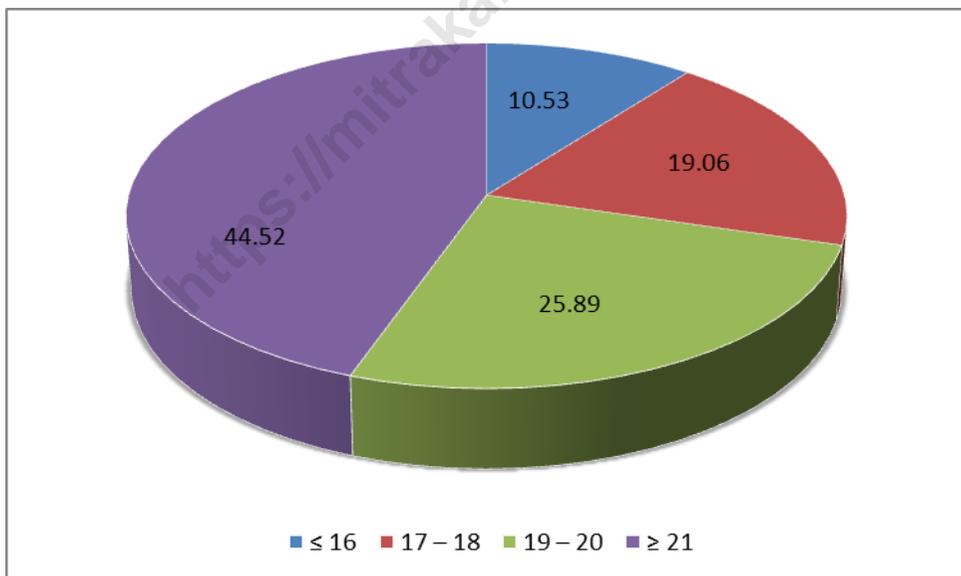
Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor demografi, yaitu tingkat kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan (migrasi). Perpindahan atau migrasi dibagi menjadi migrasi masuk dan migrasi keluar. Tingkat fertilitas merupakan faktor demografi yang menentukan penurunan tingkat pertumbuhan penduduk. Program KB dan penundaan usia perkawinan pada wanita merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas, karena memperpendek masa reproduksi mereka.

Usia perkawinan pertama seorang wanita berpengaruh terhadap resiko melahirkan. Semakin muda usia perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan/melahirkan, baik keselamatan ibu maupun anak, karena belum matangnya rahim wanita muda untuk proses berkembangnya janin atau karena belum siapnya mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN), usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Hasil Susenas menunjukkan bahwa di tahun 2016 terdapat sekitar 55,48 persen wanita umur 10 tahun ke atas yang menikah pada usia di bawah 21 tahun di Kabupaten Minahasa Tenggara. Angka ini meningkat cukup tajam setelah di tahun sebelumnya persentasenya sekitar 39,96 persen. Perkawinan di bawah 21 tahun secara kesehatan reproduksi bisa dikatakan masih terlalu muda, secara mental sosial belum siap dan secara ekonomi juga biasanya belum mapan. Semakin muda usia kawin pertama yang dilakukan seseorang, maka akan semakin lama pula masa reproduksinya.

Gambar 1.4. Persentase Perempuan Umur 10 Tahun Ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama, 2016



Sumber: Susenas 2016

Hal ini berpengaruh pada tingkat fertilitas wanita dan penduduk secara umumnya. Semakin lama masa reproduksi wanita, maka kemungkinan wanita tersebut melahirkan banyak anak akan semakin besar. Dalam persoalan makro, hal ini akan menyebabkan meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk suatu daerah

Jika dilihat lebih detail ke kelompok umur kurang dari 21 tahun, masih ada sekitar 11 persen wanita di Kabupaten Minahasa Tenggara yang menikah atau kawin pada umur 16 tahun ke bawah.

1.5. Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak, dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi yang berbagai jenis macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan instansi pemerintah yang menangani program KB ini. BKKBN mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat, terutama untuk kepesertaan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti IUD dan Implan. Dengan cakupan KB yang semakin meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk lebih dapat dikendalikan lagi.

Berdasarkan hasil Susenas, persentase wanita yang berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin dan sedang menggunakan alat/cara KB pada tahun 2016 sebanyak 64,02 persen.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi 2, yaitu sementara dan permanen. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, keterjangkauan harga, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efektif, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

**Tabel 1.3 Wanita Usia 15-49 tahun Pengguna Alat/Cara KB (persen),
2015 - 2016**

Alat/Cara Kontrasepsi	2015	2016
(1)	(2)	(3)
MOW/Tubektomi	2,49	1,50
MOP/Vasektomi	0,00	0
AKDR/IUD/Spiral	8,82	5,51
Suntikan	47,41	51,87
Implan/Susuk	15,59	13,18
Pil	23,44	26,38
Kondom/Karet	0,87	0
Intravag/Kondom Wanita	0,00	0
Cara Tradisional	1,38	1,55
% Wanita yang sedang menggunakan alat/cara KB	69,70%	64,02%

Sumber : Susenas 2016

Melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Badan Pusat Statistik memotret bahwa di tahun 2016 suntikan dan pil merupakan dua alat kontrasepsi yang paling banyak dipilih oleh wanita umur 15-49 tahun yang pernah kawin. Kondisi ini masih sama dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya (Tahun 2015), terdapat 47 persen dari mereka adalah pengguna alat KB suntik, sementara 23 persen adalah pemakai pil KB. Di sisi lain, masih terdapat 1 dari 100 wanita di rentang usia tersebut yang masih menggunakan KB cara tradisional.

<https://mitrakab.bps.go.id>

2. KESEHATAN DAN GIZI

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu aspek penting yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

2.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

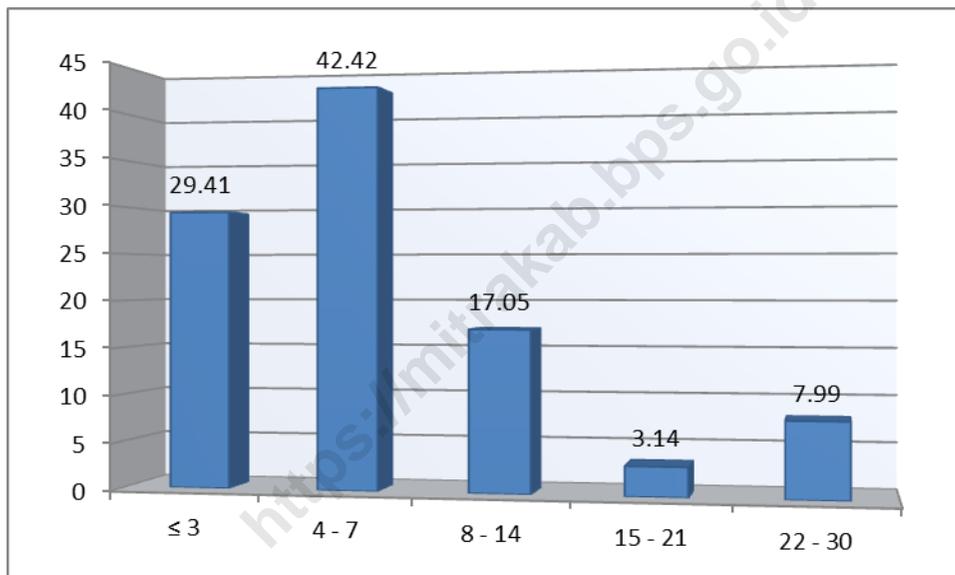
Salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk adalah morbiditas atau angka kesakitan penduduk dan rata-rata lama sakit atau lamanya terganggu aktifitas sehari-hari. Semakin kecil angka morbiditas dan rata-rata lama sakit berarti semakin baik penanganan keluhan kesehatan di suatu daerah. Merujuk pada konsep Badan Pusat Statistik, morbiditas menunjukkan adanya keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun aktivitas lainnya.

Pada tahun 2016, angka kesakitan (morbiditas) di Kabupaten Minahasa Tenggara mencapai 29,65 persen. Hal ini berarti sekitar 29 hingga

30 dari 100 orang mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

Rata-rata lamanya seseorang terganggu karena sakitnya di tahun 2016 adalah 8,27 hari. Laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam lamanya seseorang terganggu kesehatannya, ini menunjukkan bahwa daya tahan tubuh tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin.

Gambar 2.1 Rata-rata Lama Sakit (Hari) di Kabupaten Minahasa Tenggara, 2016



Sumber: Susenas 2016

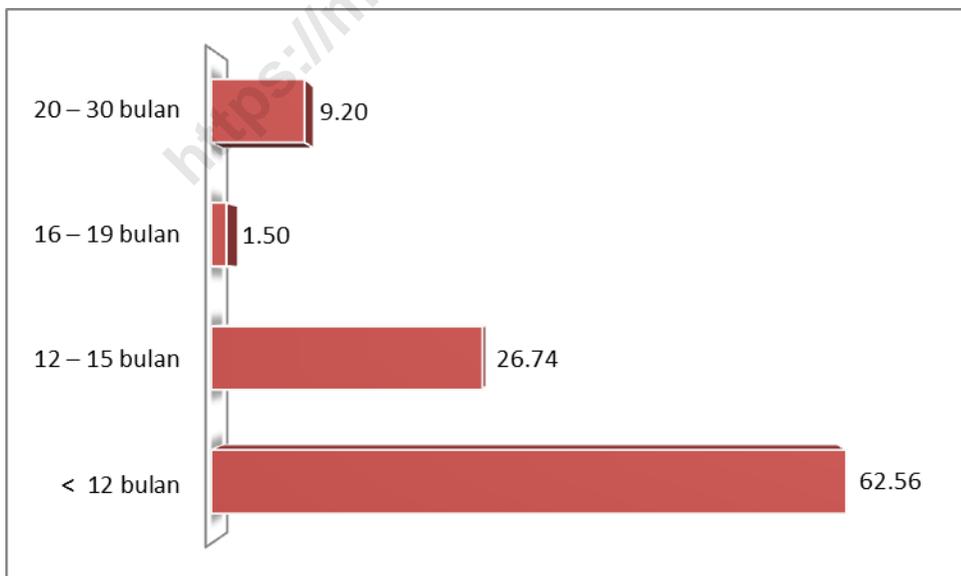
2.2. Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Ibu yang sedang mengandung harus memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Setelah sang anak lahir, Air Susu Ibu (ASI) dianjurkan supaya diberikan hingga anak berusia 2 tahun. ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Semakin lama bayi mendapatkan ASI, kekebalan/proteksi tubuh bayi akan lebih kuat. Pemerintah mencanangkan pemberian ASI eksklusif untuk anak hingga 6 bulan, setelah itu anak

diberikan makanan pendamping ASI dan terus diberi ASI hingga usia 2 tahun. Di tahun 2016, terdapat 78,11 persen anak usia di bawah 2 tahun yang masih menerima pemberian ASI dari ibunya.

Penyuluhan atau Sosialisasi tentang pentingnya pemberian ASI hingga anak berusia 2 tahun dapat terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kesadaran ibu untuk memberikan ASI juga sangat diperlukan demi generasi yang tahan terhadap penyakit kedepannya. Tentu saja dukungan seorang ayah juga tak kalah pentingnya untuk meningkatkan persentase anak yang mengkonsumsi ASI hingga usia 2 tahun. Gambar 2.2 menunjukkan persentase lama pemberian ASI terhadap anak usia di bawah 2 tahun; dari gambar dapat dilihat bahwa hampir 63 persen anak di bawah 2 tahun mendapatkan pemberian ASI selama kurang dari 12 bulan, sedangkan 9,20 persen menerima hingga usia 20-23 bulan.

Gambar 2.2 Lama Pemberian ASI (Bulan), 2016

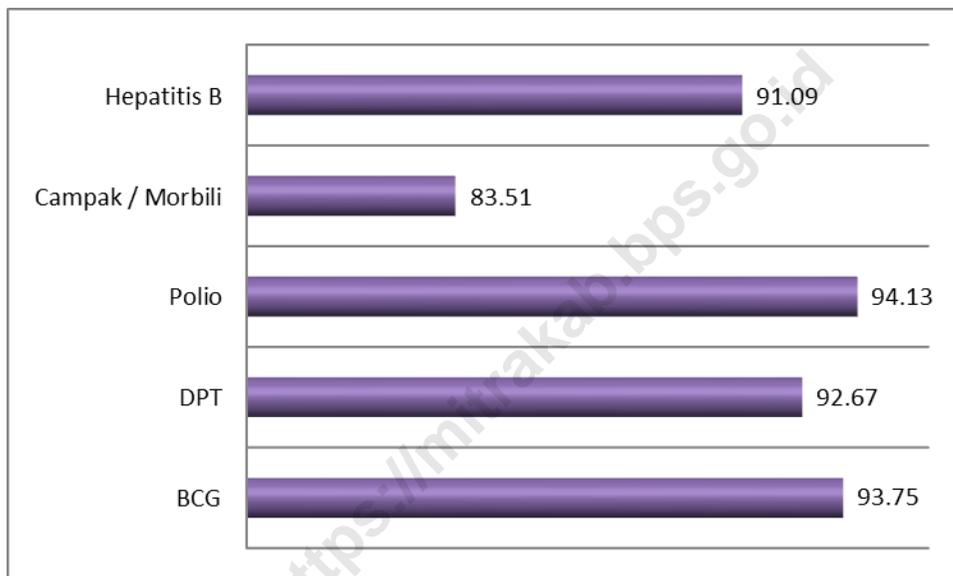


Sumber: Susenas 2016

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Kementerian kesehatan menganjurkan

agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang memperoleh imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari berbagai macam penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili, dan Hepatitis B.

Gambar 2.3. Balita yang Pernah Mendapatkan Imunisasi (persen), 2016



Sumber: Susenas 2016

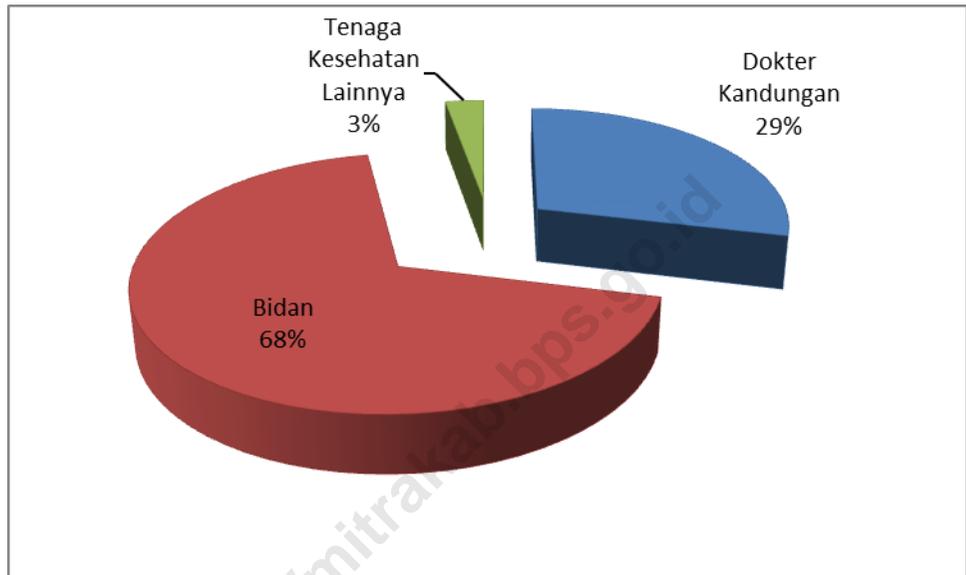
Balita yang pernah mendapatkan imunisasi Campak di Kabupaten Minahasa Tenggara masih tergolong relatif rendah, angkanya kurang dari 90 persen. Balita yang mendapatkan imunisasi BCG, DPT, Polio, dan Hepatitis B sudah lebih dari 90 persen.

2.3 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Hal yang penting lainnya adalah ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang diupayakan agar

persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional (dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya).

Gambar 2.4. Komposisi Penolong Persalinan Bayi di Kabupaten Minahasa Tenggara (persen), 2016



Sumber: Susenas 2016

Dalam hal tenaga persalinan, masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara umumnya sudah memiliki preferensi untuk menggunakan tenaga kesehatan/medis. Dari seluruh bayi yang lahir di tahun 2016, 100 persen ditolong oleh tenaga kesehatan/medis, dimana 68 persen ditolong oleh bidan. Persalinan yang ditolong oleh tenaga terdidik dan terlatih akan meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup ibu dan bayi. Peningkatan persentase penolong persalinan oleh tenaga kesehatan idealnya terus meningkat dari tahun ke tahun, karena hal tersebut terkait erat dengan kelangsungan hidup ibu dan bayi yang dilahirkannya. Dari beberapa pilihan tenaga medis, enam puluh delapan persen masyarakat lebih memilih ditolong oleh bidan pada saat persalinan. Selain karena bidan merupakan tenaga yang dilatih khusus untuk menolong persalinan, bidan juga mudah dijangkau sejak adanya program

bidan desa. Di perkotaan pun bidan mudah dijangkau karena di setiap Puskesmas tersedia tenaga bidan.

Selain bidan, preferensi masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memilih dokter dalam hal penolong persalinan juga cukup banyak yakni sekitar 29 persen. Masyarakat perkotaan lebih memilih dokter dibanding tenaga medis lain. Kemudahan mendapatkan pelayanan dokter di perkotaan menjadikan masyarakat lebih memilih dokter. Bidan biasanya tersedia di rumah bersalin dan puskesmas. Rumah sakit yang ditangani oleh dokter biasanya menjadi pilihan utama bagi masyarakat perkotaan untuk melakukan proses persalinan.

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan layanan kesehatan.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Tampak perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara penduduk di perdesaan dan penduduk di perkotaan ini dapat disebabkan oleh ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas kesehatan tersebut, ditambah perilaku penduduk itu sendiri.

Tabel 2.1 Penduduk yang Berobat Jalan Berdasarkan Lokasi Berobat (persen), 2016

Lokasi Berobat	Persentase
(1)	(2)
Rumah Sakit Pemerintah	8,77
Rumah Sakit Swasta	3,62
Praktek Dokter/Bidan	49,31
Klinik/Praktek Dokter Bersama	7,67
Puskesmas/Pustu	32,83
UKBM *)	0,00
Praktek Pengobatan Tradisional	1,77
Lainnya	1,55

Sumber: Susenas

*) terdiri dari Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan

Dalam hal tempat berobat bagi penduduk yang berobat jalan, yang paling menonjol pada tahun 2016 adalah penduduk yang berobat ke praktek dokter/bidan (49,31 persen) dan puskesmas/pustu (32,83 persen).

<https://mitrakab.bps.go.id>

3. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan, dan berkualitas dari segi pembelajaran. Selain pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan

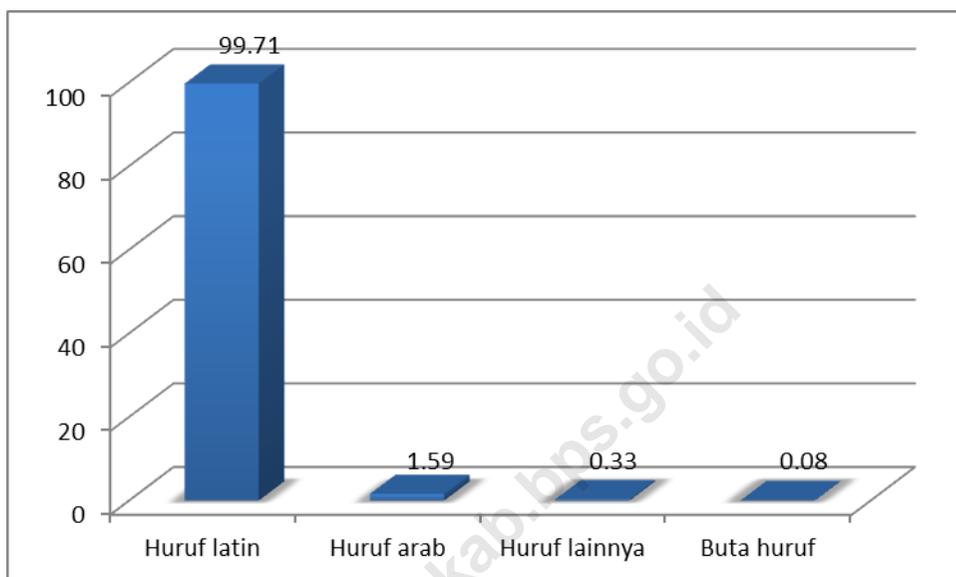
disajikan dalam bab ini adalah Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2016 yang dilakukan oleh BPS.

3.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Kemampuan baca-tulis penduduk dewasa merupakan ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan, yang tercermin dari data angka melek huruf, yaitu persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca huruf latin, huruf arab, dan atau huruf lainnya. Penduduk yang dapat membaca huruf latin, huruf arab, dan atau huruf lainnya di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2016 hampir mencapai 100 persen, sisanya sebanyak 0,08 persen adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca atau buta huruf.

Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Minahasa Tenggara sudah sangat tinggi. Tidak hanya di Kabupaten Minahasa Tenggara, banyak kabupaten/kota lain di Indonesia yang juga sudah mencapai AMH yang cukup tinggi. Dengan sudah tingginya AMH di sebagian besar wilayah Indonesia, maka AMH tersebut sudah dianggap tidak dapat membedakan kondisi pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Oleh karena itu, AMH tidak lagi menjadi komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lagi. AMH diganti dengan indikator *Expected Years of Schooling (EYS)* atau Harapan Lama Sekolah (HLS).

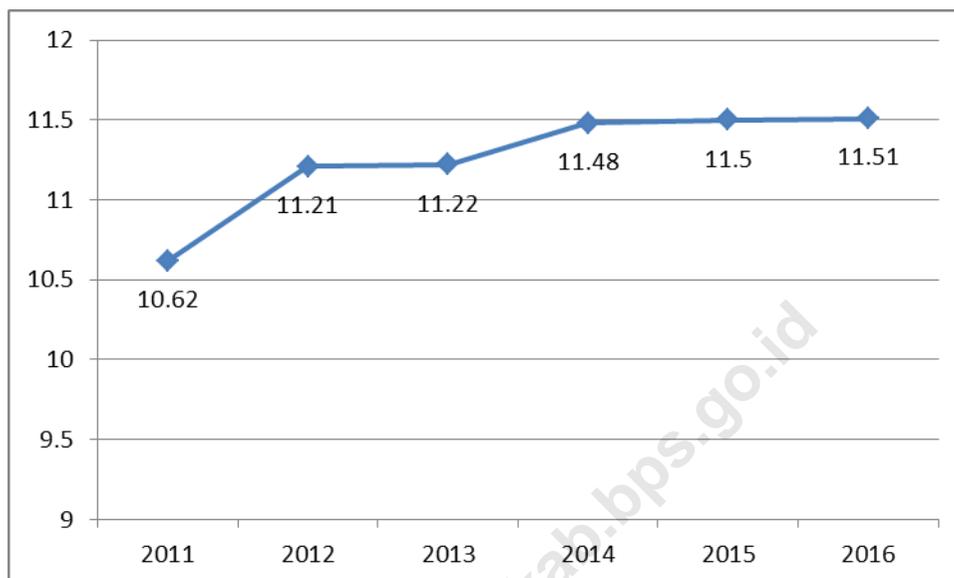
Tabel 3.1 Angka Melek Huruf (AMH), 2016



Sumber: Susenas 2016

Angka HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 3.2. Harapan Lama Sekolah, 2011-2016



Sumber : Susenas 2016

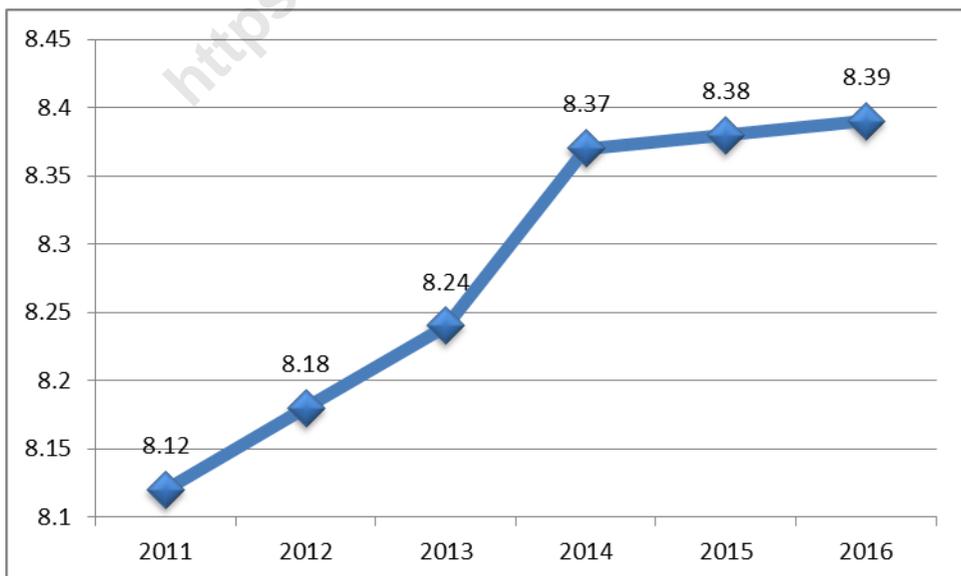
Dari tahun 2011 hingga 2016 angka HLS terus meningkat, cepat lambatnya pertumbuhan angka ini dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan. Rata-rata tiap orang di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2016 diharapkan akan melalui pendidikannya selama 12 tahun. Angka HLS merupakan indikator jangka pendek. Indikator ini dapat dengan mudah bergerak jika ada kebijakan baru dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu, karena dipengaruhi oleh kebijakan jangka pendek maka HLS merupakan salah satu indikator proses. Jika suatu tahapan dalam pendidikan tidak berjalan semestinya, atau jika ada kebijakan yang membuka peluang partisipasi sekolah namun tidak lagi bertahan, maka dimungkinkan terjadinya penurunan angka HLS. Satu yang harus diingat adalah, indikator pendidikan mengukur manusianya. Pendidikan itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh fasilitas, infrastruktur dan kebijakan, sebab manusia itu kompleks. Tanpa ada kemauan dari pribadi seseorang untuk meningkatkan taraf pendidikannya,

segala fasilitas, infrastruktur dan kebijakan, sebaik apapun itu, tidak akan ada artinya.

3.2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Indikator ini dihitung dari penduduk yang berusia 25 tahun ke atas karena mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP, sehingga dapat dibandingkan hingga level dunia. Selain itu dipilih penduduk umur 25 tahun ke atas karena asumsinya pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting sebagai salah satu komponen pembentuk indeks pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Gambar 3.3 Rata-rata Lama Sekolah, 2011-2016



Sumber: Susenas 2016

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2016 adalah 8,39 tahun. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya hanya 0,01 poin. Ini menunjukkan bahwa dari tahun 2016 tidak ada kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 3 SMP.

3.3. Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Untuk melihat indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat didekati dengan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki.

Tabel 3.3 Penduduk 15 tahun keatas per Jenis Kelamin Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki (persen), 2016

Ijazah	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak mempunyai ijazah	19,98	16,44	18,28
SD / MI / Paket A	31,87	33,46	32,63
SMP / MTs / Paket B	16,83	16,64	16,74
SMA / SMK / MA / Paket C	26,59	23,59	25,15
Perguruan Tinggi (PT)	4,74	9,87	7,19
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang lebih berkualitas yang dapat meningkatkan

mutu sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggara. Diurutkan dari persentase terbesar, di tahun 2016, sebagian besar (32,63%) penduduk berusia 15 tahun ke atas menamatkan pendidikan SD, 25,15 persen merupakan tamatan SMA, 18,28 tidak/belum tamat SD, 16,74 persen tamatan SMP, serta 7,19 tamatan Perguruan Tinggi.

Dalam hal pendidikan terlihat bahwa telah terjadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat pada statistik pendidikan yang ditamatkan. Tidak ada perbedaan nyata antara persentase perempuan yang menamatkan pendidikan tertentu dengan persentase laki-laki pada tingkat pendidikan yang sama. Tipisnya perbedaan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kesempatan belajar antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Budaya masa lalu dimana perempuan tidak perlu sekolah karena dipersiapkan untuk mengurus rumah tangga saja sejak lama tidak tergambar di masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara. Jika ada perbedaan dalam hal persentase, dimungkinkan lebih dipengaruhi oleh kemauan pribadi.

3.4. Tingkat Partisipasi Sekolah (APS, APK, dan APM)

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Program Wajib Belajar 9 tahun di Kabupaten Minahasa Tenggara belum sepenuhnya berhasil. Ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada anak usia 13-15 tahun yang sebesar 92,55 persen. Dengan kata lain masih ada 7,45 persen anak usia SMP yang seharusnya bersekolah ternyata sudah berhenti atau putus sekolah. APS menunjukkan persentase anak usia sekolah yang sedang berada di jenjang pendidikan tertentu.

Semakin besar nilai APS semakin berhasil program peningkatan kualitas pendidikan di suatu daerah.

Pada anak usia 7-12 tahun, APS menunjukkan angka yang baik, yaitu 97,67 persen. Pada kelompok usia SLTA (16-18 tahun) APS jelas akan lebih kecil dibandingkan usia SMP, yaitu sekitar 63,06 persen, karena banyak diantara mereka sudah terjun ke dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah, 2016

Usia Sekolah (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7 – 12	96,55	98,84	97,67
13 – 15	85,19	98,97	92,55
16 – 18	64,63	61,26	63,06

Sumber: Susenas 2016

Isu *gender* pada indikator APS Kabupaten Minahasa Tenggara cukup menarik. Umumnya di Indonesia ataupun di negara-negara berkembang biasanya anak-anak perempuan ada diskriminasi untuk menikmati pendidikan. Mereka lebih dieksploitasi untuk membantu orang tuanya dalam mengurus urusan rumah tangga ataupun bekerja. Anak laki-laki justru mendapat perhatian lebih dalam hal pendidikan karena dialah yang diharapkan akan mengembalikan investasi sekolah atau dengan kata lain ada anggapan *rate of return* investasi pendidikan pada anak laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Di Kabupaten Minahasa Tenggara yang terjadi sebaliknya, anak perempuan memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibanding anak laki-laki pada jenjang umur 7-12 dan 16-18 tahun. Perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai penyebab pasti kondisi tersebut terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan, 2016

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI/PAKET A	121,85	106,82	114,50
SMP/SLTP/MTS/PAKET B	67,96	112,79	91,90
SMA/SLTA/MA/PAKET C	78,32	78,05	78,20

Sumber: Susenas 2016

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK dimungkinkan lebih dari 100 persen karena ada penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu ada yang di luar kelompok usia yang seharusnya.

Tabel 3.6 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan, 2016

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI/PAKET A	96,55	85,70	91,25
SMP/SLTP/MTS/PAKET B	67,96	86,87	78,06
SMA/SLTA/MA/PAKET C	64,43	57,40	61,40

Sumber: Susenas 2016

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Pada tahun

2016 APM SD/Sederajat di Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 91,25 persen, artinya tidak seluruh anak usia 7-12 tahun yang masih sekolah, bersekolah pada jenjang SD/sederajat.

<https://mitrakab.bps.go.id>

4. KETENAGAKERJAAN

Salah satu masalah besar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil masalah yang dihadapi oleh pemerintah.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Indikator tersebut antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jam kerja.

4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun keatas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan

untuk mengukur pengangguran yaitu TPT. Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2014 - 2015

Indikator	2014	2015
(1)	(3)	(4)
TPAK	62,56	63,42
TPT	4,26	4,46

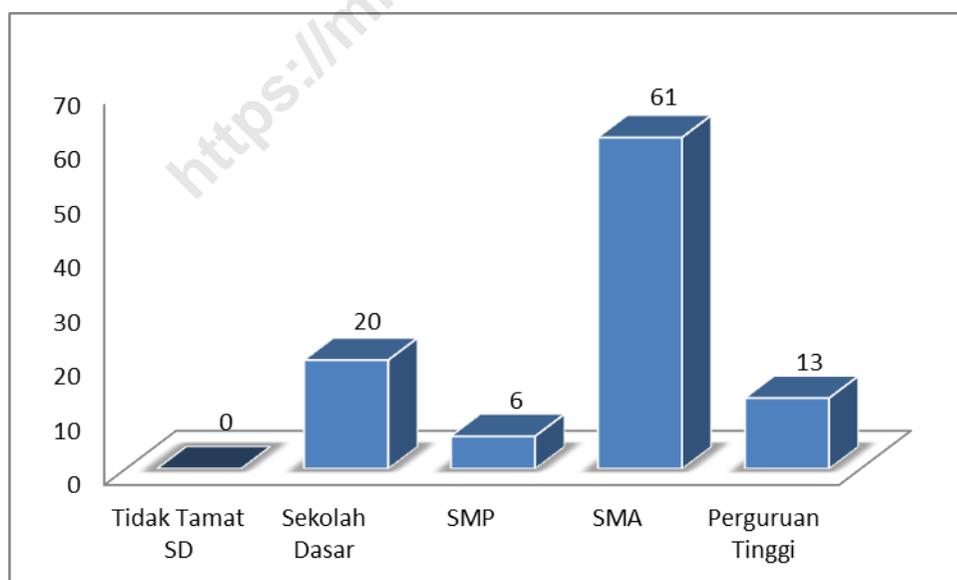
Sumber: Sakernas 2015

TPT Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami kenaikan dalam 1 tahun terakhir. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan angka 4,26 persen pada tahun 2014 menjadi 4,46 persen pada tahun 2015. Sejalan dengan TPT, TPAK juga mengalami kenaikan, dari 62,56 persen di tahun 2014 menjadi 63,42 persen di tahun 2015. Penambahan angkatan kerja yang dibarengi dengan bertambahnya pengangguran mengindikasikan kurangnya lapangan kerja di Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapat menarik para pengangguran masuk ke dalamnya.

4.2. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan. Sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Gambar 4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan (persen), 2015



Sumber: Sakernas 2015

Pada tahun 2015, kebanyakan penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara penganggur adalah yang berpendidikan SMA, yaitu sekitar 61 persen.. Jumlah penganggur yang tidak tamat SD lebih besar dibandingkan

dengan penganggur yang sudah menamatkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Penganggur yang tidak tamat SD lebih kecil dibandingkan dengan penganggur yang sudah menamatkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Penganggur yang sudah tamat perguruan tinggi inilah yang kemudian disebut dengan penganggur intelektual. Penganggur intelektual ini menempati urutan ke 3 terbanyak setelah penganggur yang tamat SMA.

4.3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada bahasan ini dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan), industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air serta bangunan/konstruksi), dan jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

Tabel 4.2. Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha (persen), 2015

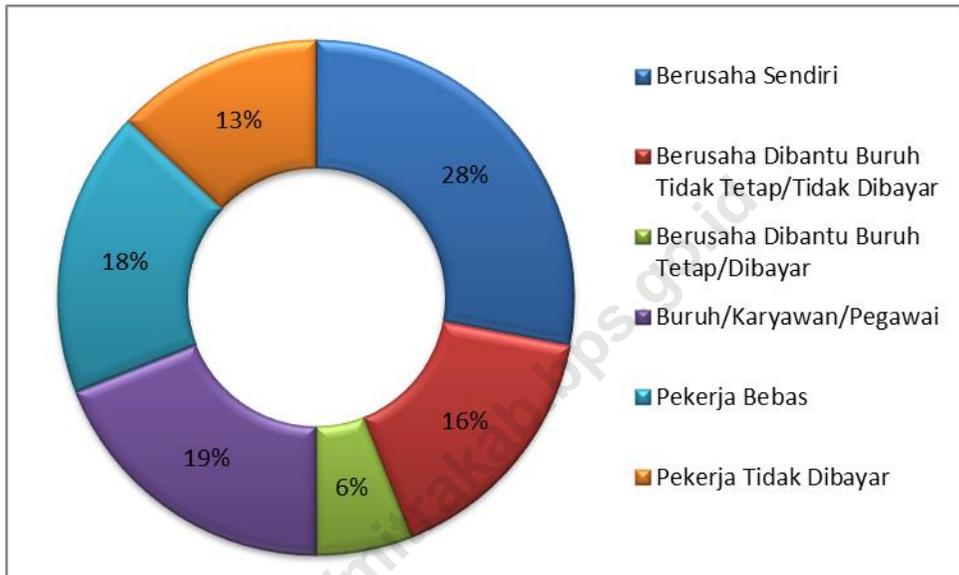
Lapangan Usaha	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	29,21	46,98	45,84
Industri	3,63	14,1	13,43
Jasa	67,16	38,92	40,73
JUMLAH	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas 2015

Sektor pertanian masih menjadi primadona di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sebanyak 45,84 persen penduduk bekerja di sektor pertanian, sedangkan sektor industri masih belum banyak diminati oleh penduduk. Penduduk yang bekerja pada sektor pertanian mendominasi wilayah pedesaan

(46,98 persen), sementara di perkotaan didominasi oleh sektor jasa (67,16 persen).

Gambar 4.2. Komposisi Status Pekerjaan Penduduk yang Bekerja (persen), 2015



Sumber: Sakernas 2015

Pada tahun 2015, penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri sebanyak 28 persen, ini merupakan yang tertinggi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Status pekerjaan terbanyak kedua adalah buruh/karyawan/pegawai sebesar 19 persen. Selain itu, penduduk yang bekerja sebagai pekerja bebas juga cukup banyak (18 persen). Pekerja bebas ini terdiri dari 2, yaitu pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas non pertanian. Pekerja bebas di pertanian lebih banyak dibandingkan pekerja bebas di non pertanian, namun tidak banyak selisihnya.

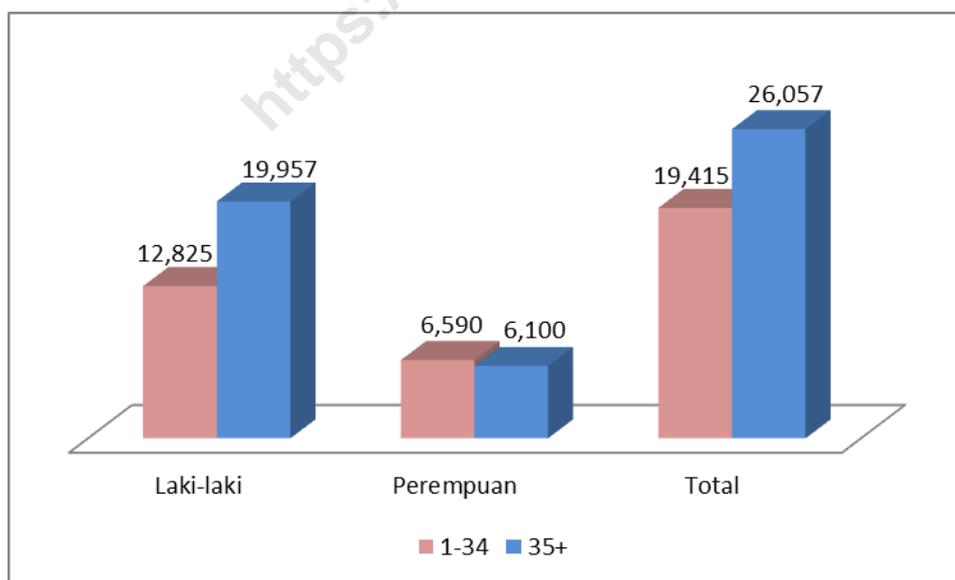
Lebih dari 40 persen penduduk perkotaan berstatus buruh/karyawan/pegawai, kurang dari 60 persen sisanya adalah pengusaha, pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar. Komposisi ini cukup berbeda dengan kondisi di pedesaan. Sekitar 28 persen penduduknya adalah pengusaha tanpa buruh/pekerja, 25 persen berikutnya berstatus

buruh/karyawan/pegawai dan sisanya adalah pengusaha dengan buruh, pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar.

4.4. Jumlah jam Kerja

Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, seorang pekerja dapat dikategorikan sebagai pengangguran tidak kentara atau terselubung dimana mereka bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam). Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan dibawah kemampuan sebenarnya. Selain itu seseorang yang terpaksa bekerja di bawah 35 jam merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian atau keterampilannya. Sementara itu, seorang pekerja yang dikategorikan sebagai bukan setengah pengangguran adalah mereka yang memiliki jumlah jam kerja normal selama seminggu (minimal 35 jam).

Gambar 4.3 Penduduk yang Bekerja menurut Jam Kerja, 2015



Sumber: Sakernas

Catatan : *) termasuk sementara tidak bekerja

Jumlah pengangguran terselubung di Kabupaten Minahasa Tenggara di tahun 2015 adalah 19.415 jiwa, 12.825 di antaranya laki-laki, dan 6.590 jiwa perempuan. Terlihat dengan jelas bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak jumlah jam bekerja jika dibandingkan dengan perempuan.

<https://mitrakab.bps.go.id>

<https://mitrakab.bps.go.id>

5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase pengeluaran untuk non makanan.

5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola

pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 699.433 menjadi Rp 797.197 selama periode 2015-2016. Bila dilihat persentasenya, persentase pengeluaran untuk makanan menurun dari 59,32 persen menjadi 54,98 persen. Sebaliknya, persentase pengeluaran untuk non makanan meningkat dari 40,68 persen menjadi 45,02 persen. Hal ini merupakan indikasi dini adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan persentase pada kelompok bukan makanan sudah merata di semua sub kelompok non makanan.

Tabel 5.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita menurut Jenis Pengeluaran, 2015-2016

Jenis Pengeluaran	Nominal (Rp)		Persentase (%)	
	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Makanan	414.875	438.292	59,32	54,98
Non Makanan	284.558	358.905	40,68	45,02
Perumahan	146.051	161.440	20,88	44,98
Barang dan Jasa	46.239	68.465	6,61	19,08
Biaya Pendidikan	10.418	14.275	1,49	3,98
Barang Kesehatan	13.735	15.875	1,96	4,42
Pakaian dan Alas Kaki	23.195	25.963	3,32	7,23
Barang Tahan Lama	25.986	47.916	3,72	13,35
Pajak dan Asuransi	10.004	14.192	1,43	3,95
Keperluan Pesta	8.930	10.779	1,28	3,00

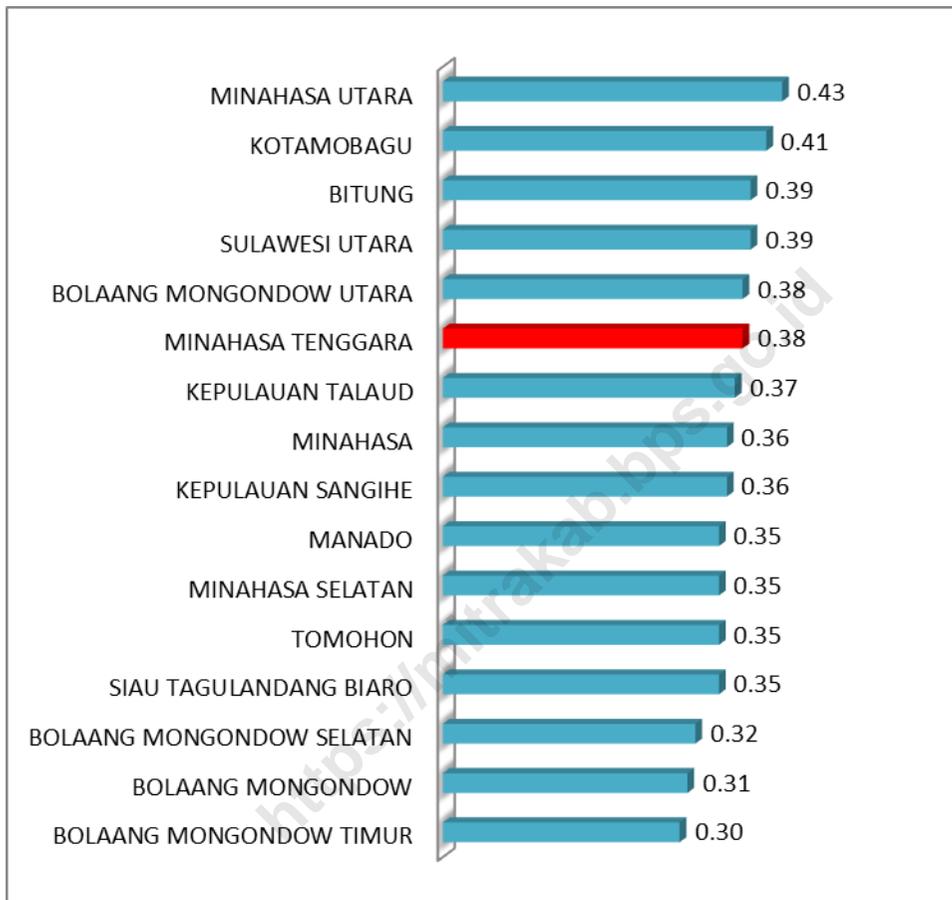
Sumber: Susenas

Dengan asumsi bahwa penduduk yang persentase pengeluaran non makanannya lebih besar dari pengeluaran makanan merupakan penduduk yang sejahtera, maka kita dapat mengatakan penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara yang sejahtera adalah penduduk yang berpenghasilan lebih dari Rp 1.000.000 per bulan. Artinya jika dalam 1 rumah tangga terdiri dari 4 anggota rumah tangga, maka penghasilan rumah tangga tersebut minimal Rp 4.000.000 per bulan.

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan, yaitu mendekati pendapatan dengan pengeluaran. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak pendekatan ini dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah indeks gini atau *gini ratio*.

Indeks gini Kabupaten Minahasa Tenggara Maret 2016 sebesar 0,38, artinya ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Minahasa Tenggara masih dalam tingkat yang sedang. Semakin tinggi indeks gini, maka semakin timpang pendapatan antar penduduk. Penduduk kaya makin kaya, penduduk miskin makin miskin.

Gambar 5.1. Gini Ratio menurut Kabupaten/Kota, 2016



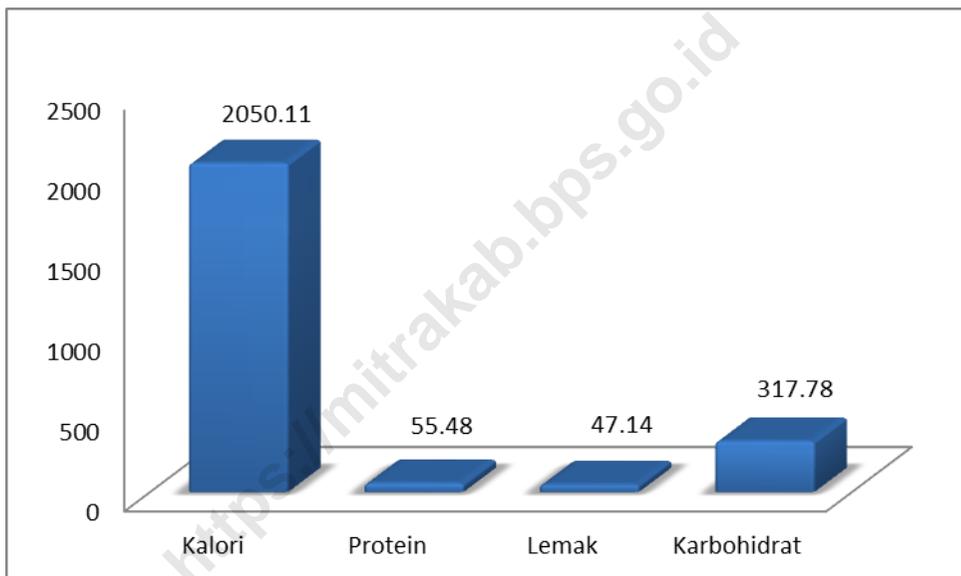
Sumber: Susenas 2016

5.2. Konsumsi Kalori dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut

golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

Gambar 5.2. Rata-rata Konsumsi Kalori, Protein, Lemak dan Karbohidrat Penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara, 2015



Sumber: Susenas 2015

Pada tahun 2015 energi yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara belum memenuhi angka kecukupan energi yang ditetapkan yaitu 2.150 kkal per hari. Penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara baru mengonsumsi kalori sekitar 2.050 kkal per hari. Sedangkan untuk konsumsi protein, penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara juga belum mencapai angka kecukupan protein yang ditetapkan, sebesar 57 gram per hari. Penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara masih mengonsumsi protein rata-rata sebesar 55,48 gram per hari.

<https://mitrakab.bps.go.id>

6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Sepanjang kehidupannya, manusia selalu membutuhkan rumah yang merupakan salah satu kebutuhan pokok hidupnya selain sandang dan pangan untuk mempertahankan diri dari keganasan alam. Dengan kata lain, rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk dapat terus bertahan hidup. Apabila rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok tersebut tidak dapat tersedia, maka manusia akan sulit untuk hidup secara layak.

Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup bersama dengan orang lain dan berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga satu persatu bangunan rumah tinggal bermunculan sampai terbentuk suatu pemukiman rumah penduduk.

Manusia membutuhkan rumah disamping sebagai tempat untuk berteduh dan berlindung dari hujan maupun panas, rumah juga diperlukan untuk memberi rasa aman penghuninya dari gangguan yang tidak diinginkan. Rumah menjadi tempat berkumpul bagi para penghuni rumah yang biasanya merupakan satu ikatan keluarga. Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bagi kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin sejahtera rumahtangga yang menempati rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan tersebut antara lain dapat dilihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar rumahtangga dan juga tempat penampungan kotoran terakhir.

6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka, sehingga kondisi kesehatan perumahan juga sangat terkait erat dengan kondisi kesehatan setiap anggota keluarga maupun tetangga sekitar. Bila kondisi perumahan sehat, tentunya peluang setiap anggota rumahtangga untuk memiliki kondisi tubuh yang sehat juga sangat besar. Namun sebaliknya, jika kondisi rumah tidak sehat maka potensi terjadi penularan penyakit juga sangat besar.

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan perumahan diantaranya adalah luas lantai rumah/tempat tinggal. Luas lantai rumah tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal (perumahan). Tabel 6.1 memberi gambaran bahwa terlepas dari kepemilikan, sebagian masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara tinggal di rumah yang kualitasnya cukup baik, yaitu beratap layak, berdinding permanen dan berlantai bukan tanah.

Tabel 6.1 Rumah Tangga menurut Indikator Kualitas Perumahan (persen), 2016

Indikator	2016
(1)	(3)
Lantai Tanah (persen)	2,18
Atap Layak * (persen)	96,69
Dinding Permanen (persen)	93,29
Rata-rata luas lantai perkapita (m ²)	22,08

Sumber : Susenas

Catatan : * Tidak beratap dedaunan

Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga. Luas lantai perkapita juga digunakan untuk mengukur apakah suatu rumah merupakan perumahan yang layak huni atau tidak. MDGs menetapkan standar luas lantai perkapita menjadi salah satu indikator rumah kumuh. Rumah tangga dengan luas lantai perkapita kurang dari $7,2 \text{ m}^2$ masuk dalam salah satu kriteria rumah kumuh. Kriteria rumah kumuh tidak hanya dilihat dari luas lantai perkapita, oleh sebab itu tidak dapat serta merta menyatakan rumah tangga dengan luas lantai perkapita kurang dari $7,2 \text{ m}^2$ masuk dalam kategori menempati rumah kumuh. Dengan mengadopsi standar MDGs tersebut, masih terdapat sekitar 16,60 persen rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai perkapita kurang $7,2 \text{ m}^2$ di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2016. Tabel 6.1 juga memberi gambaran bahwa masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara umumnya menempati luas lantai perkapita yang sudah layak, jauh di atas standar kumuh, rata-rata seorang penduduk menguasai lantai rumah sekitar 21 m^2 .

Selain luas lantai, jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Rumah tangga dengan jenis lantai keramik atau marmer mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada rumahtangga yang mempunyai jenis lantai semen, ubin atau tanah. Selain itu, jenis lantai juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacingan dan penyakit kulit. Berdasarkan data Susenas 2016, masih ada 2,18 persen rumah tangga di Kabupaten Minahasa Tenggara yang berlantaikan tanah. Semakin rendah persentase rumah tangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada tingginya derajat kesehatan masyarakat.

Indikator kualitas perumahan yang lain diantaranya adalah rumah tangga dengan atap yang layak (tidak beratap dedaunan) dan dinding permanen. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara tinggal di rumah yang beratap seng. Data tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 97 persen rumah tangga tinggal di rumah yang beratap layak dan 93 persen rumah tangga rumahnya berdinding permanen.

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih serta jamban dengan tangki septik.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumahtangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Dalam bahasan ini, cakupan air bersih yang dimaksud adalah air kemasan, air isi ulang, air ledeng, air pompa, air sumur terlindung dan air yang bersumber dari mata air yang jaraknya lebih dari 10 m dari pembuangan akhir tinja.

Pada tahun 2016, 33,57 persen rumah tangga di Kabupaten Minahasa Tenggara menggunakan air kemasan bermerk dan air isi ulang, 29,85 persen mengakses sumur terlindung, 25,85 persen mengakses mata air terlindung maupun mata air tidak terlindung, sumur tak terlindung 7,30 persen, sumur bor/pompa 2,10 persen, dan hanya 1,33 persen yang menggunakan ledeng.

Sistem pembuangan kotoran/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran

manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Di Kabupaten Minahasa Tenggara, pada tahun 2016 terdapat sekitar 76 persen rumah tangga yang memiliki jamban sendiri dan 81 persen rumah tangga menggunakan jamban dengan tangki septik.

Tabel 6.2. Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Untuk Minum (persen), 2016

Sumber Air Utama	Persentase (%)
(1)	(2)
Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	33,57
Leding Meteran, Leding Eceran	1,33
Sumur Bor / Pompa	2,10
Sumur Terlindung	29,85
Sumur Tak Terlindung	7,30
Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung	25,85
Air Permukaan	0,00
Air Hujan	0,00
Lainnya	0,00
Jumlah	100,00

Tabel 6.3 Tabel Indikator Perumahan Kabupaten Minahasa Tenggara, 2016

Indikator	Persentase
(1)	(4)
Jamban sendiri	76,31
Jamban sendiri dengan tangki septik	81,01
Sumber penerangan listrik	99,71

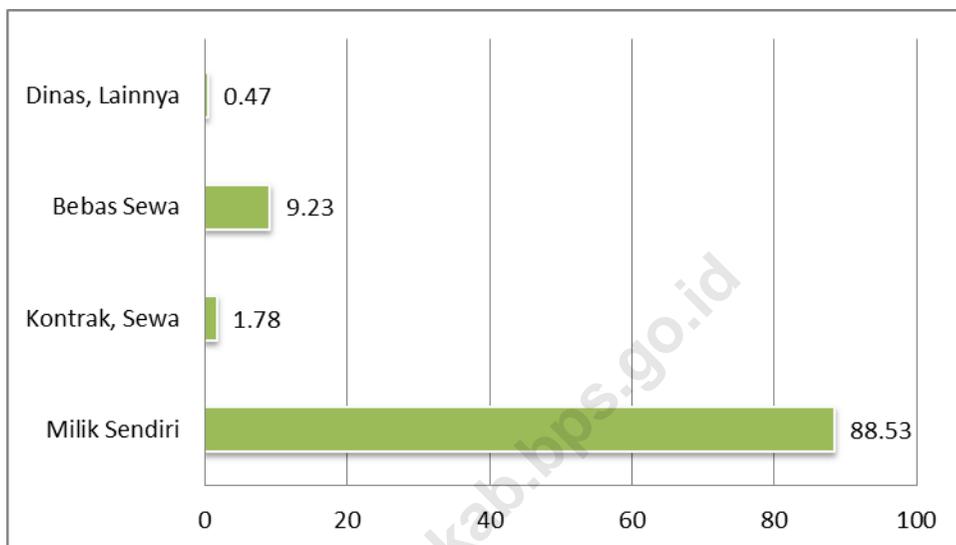
Sumber : Susenas 2016

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil susenas 2016, sembilan puluh sembilan persen rumah tangga di Kabupaten Minahasa Tenggara sudah menikmati fasilitas listrik. Hanya ada sekitar 0,29 persen yang belum memperoleh fasilitas listrik.

6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup disini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Gambar 6.1. Rumah tangga yang Menurut Status Kepemilikan Bangunan yang Ditempati (persen), 2016



Sumber: Susenas 2016

Sekitar 89 persen rumah tangga di Minahasa Tenggara telah menempati rumah milik sendiri, 9 persen lainnya menempati rumah tanpa membayar sewa kepada pemilik rumah, 1,78 persen rumah tangga menyewa/mengontrak tempat tinggalnya dan 0,47 persen menempati rumah dinas.

Penduduk pedesaan lebih banyak menempati rumah milik sendiri dibandingkan dengan penduduk perkotaan.. Rumah kontrakan atau kos lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Kemungkinan lain adalah mengenai lahan di daerah perkotaan sedikit untuk membangun rumah. Kalaupun ada, harganya lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Sehingga penduduk yang belum memiliki rumah lebih memutuskan untuk menempati rumah kontrak, sewa, atau bebas sewa.

7. KEMISKINAN

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia.

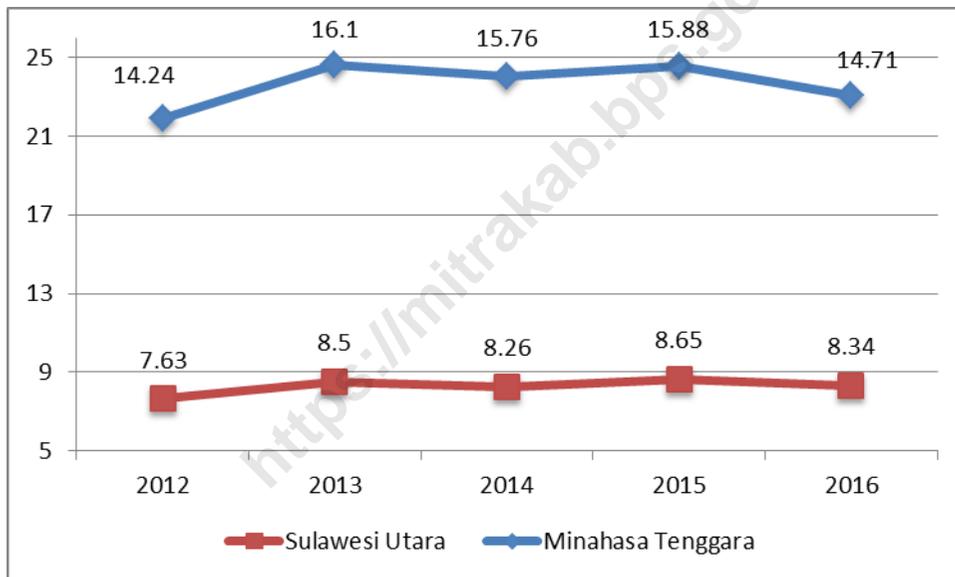
Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs, yang kemudian berubah menjadi SDGs mulai tahun 2016. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah seberapa jauh gap atau perbedaan antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan (P1) dan seberapa besar variasi pendapatan antar penduduk miskin (P2). Tentunya, semakin kecil indikator-indikator tersebut menandakan bahwa program pengentasan kemiskinan di suatu wilayah berhasil. Indikator distribusi pendapatan, walaupun didekati dengan pengeluaran, akan memberi petunjuk aspek pemerataan yang telah tercapai.

7.1 Perkembangan Kemiskinan

Peliknya masalah kemiskinan mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah nyata dalam penanggulangannya, sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas yang utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Gambar 7.1. Persentase Penduduk Miskin, 2012 - 2016



Sumber: Susenas 2016

Gambar di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Minahasa Tenggara masih berada di atas angka nasional. Artinya, Kabupaten Minahasa Tenggara menyumbang bertambahnya angka kemiskinan. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa program pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara selama 4 tahun terakhir masih belum sepenuhnya optimal. Cukup tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara maka membutuhkan upaya yang keras dari berbagai pihak untuk menanggulangnya.

7.2. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)

Membahas kemiskinan tidak hanya sekedar mengenai persentase penduduk miskin (P₀). Tetapi ada variabel lain yang juga berkaitan, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P₂). Penurunan pada P₁ mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan berkurangnya penurunan pada P₂ mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Tabel 7.1. Perkembangan Kemiskinan menurut Indikator di Kabupaten Minahasa Tenggara, 2014 - 2016

Indikator	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan	3,49	3,11	2,68
Indeks Keparahan Kemiskinan	1,04	0,79	0,80
Garis Kemiskinan (Rp)	258.986	277.491	285.791

Sumber : Susenas

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga perlu memperhatikan jarak terhadap batas miskin (tingkat kedalaman kemiskinan) dan ketimpangan antar penduduk miskin (tingkat keparahan kemiskinan). Oleh karena itu, selain harus mampu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Selama periode 2014-2016 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) mengalami penurunan. Pergerakan Indeks kedalaman kemiskinan menurun, hal itu mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin kecil. Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun dari 3,49 di 2014 menjadi 3,11 di 2015, setelah itu menurun di tahun 2016 menjadi 2,68. Indeks Keparahannya Kemiskinan yang menurun mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin kecil. Nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan turun dari 1,04 di 2014 menjadi 0,79 di 2015, kemudian sedikit meningkat di tahun 2016 menjadi 0,80.

8. SOSIAL LAINNYA

Perjalanan wisata menjadi salah satu indikator sosial yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, gaya hidup masyarakat juga cenderung berubah dengan melakukan pemenuhan kebutuhan tersier yang salah satunya adalah berwisata. Tujuan melakukan perjalanan wisata biasanya untuk relaksasi, menikmati hari libur, menikmati pemandangan alam dan lain-lain.

Aspek sosial lain seperti akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Semakin terjangkau harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha serta tingkat keamanan wilayahnya. Semakin besar masyarakat mendapatkan pelayanan kredit usaha semakin mempermudah masyarakat untuk meningkatkan aktivitas usahanya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas dan bekerja. Semakin rendah tingkat kejahatan di suatu wilayah menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

8.1. Perjalanan Wisata

Perjalanan wisata yang dijadikan indikator dalam Susenas adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan dan bukan untuk tujuan memperoleh upah/gaji di tempat yang dikunjungi atau sekolah serta bersifat perjalanan bukan rutin, tujuan utama bepergiannya adalah berlibur/rekreasi.

Tabel 8.1 Penduduk per Jenis Kelamin yang Melakukan Kegiatan Bepergian Dalam 6 Bulan Terakhir (Persen), 2016

	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Minahasa Tenggara	19,73	19,59	19,66

Sumber : Susenas 2016

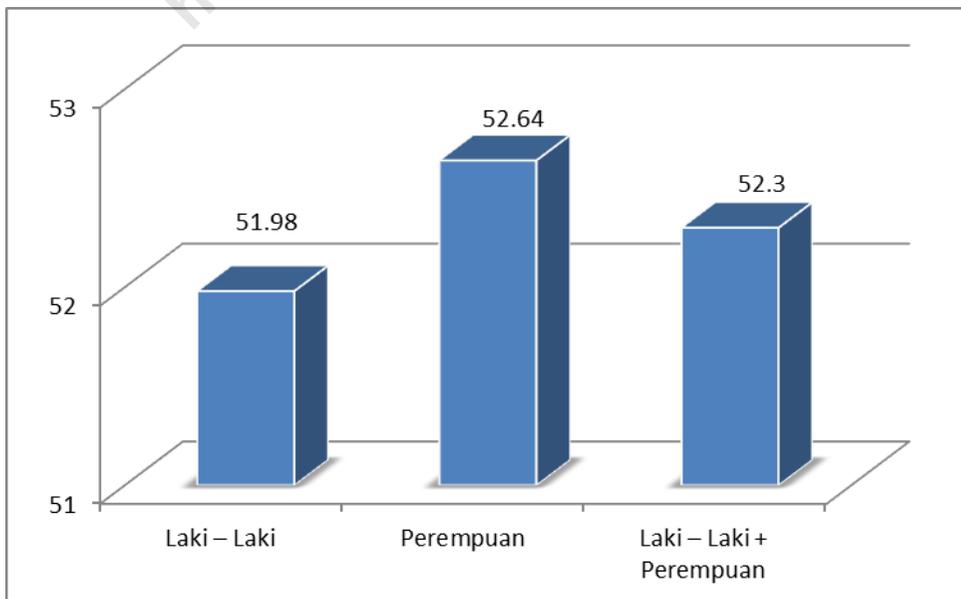
Persentase penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara yang bepergian dengan tujuan wisata pada tahun 2016 adalah 19,66 persen. Penduduk yang bepergian ini melakukan dengan berbagai maksud, diantaranya untuk berlibur/wisata, profesi, kesehatan/berobat, mengunjungi teman/saudara, dan berziarah/keagamaan/ lainnya. Di Kabupaten Minahasa Tenggara penduduk banyak melakukan bepergian dengan maksud untuk mengunjungi teman/saudara, ada sekitar 36,67 persen dari jumlah penduduk yang bepergian. Sedangkan penduduk yang bepergian dengan maksud untuk berwisata sekitar 33,87 persen dari jumlah penduduk yang bepergian, atau dengan kata lain sekitar 3,4 persen dari seluruh penduduk Minahasa Tenggara. Jika dibandingkan antara persentase penduduk laki-laki dan perempuan, terdapat perbedaan yang tidak signifikan. Hal ini cukup menjadi dasar kesimpulan bahwa preferensi laki-laki dalam hal bepergian/berwisata tidak berbeda dengan perempuan.

8.2. Akses pada Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan HP/telepon seluler. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunaannya.

Di tahun 2016, penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara yang menguasai/memiliki HP sebanyak 52,30 persen. Jika dilihat dari sisi gender, hanya sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan terkait kepemilikan HP, dimana 51,98 persen penduduk laki-laki usia 5 tahun ke atas memiliki HP, sementara untuk penduduk perempuan, 52,64 persen di antaranya memiliki HP.

Gambar 8.1. Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki HP (persen), 2016



Sumber: Susenas 2016

Selain kepemilikan HP, akses terhadap internet juga dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Susenas 2016 memberi gambaran bahwa 21 hingga 22 dari 100 penduduk 5 tahun ke atas Kabupaten Minahasa Tenggara mengakses internet.

8.3. Kredit Usaha

Aliran dana ke masyarakat berupa kredit usaha yang berdampak kepada pergerakan ekonomi rakyat akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk pelayanan pemberian kredit usaha kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya maupun perorangan. Pemberdayaan dalam bentuk pemberian kredit usaha ini akan mendukung peningkatan pendapatan, produktifitas, dan penyediaan lapangan kerja.

Tabel 8.2. Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha (persen), 2016

Jenis Kredit Usaha	Persentase (%)
(1)	(2)
PNPM	44,36
Kredit usaha Rakyat (KUR)	16,33
Program Bank Selain KUR	18,97
KUBE / KUB	0,87
Program Koperasi	21,00
Perorangan (Dengan Bunga)	15,24
Lainnya	1,77
% RT yang Menerima Kredit Usaha	26,36

Sumber: Susenas 2016

Kredit Usaha yang dimaksud dapat berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diberikan oleh beberapa bank terpilih dan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, Perkotaan, Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. Jenis program penyaluran yang lain seperti KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi), KPEN-RP (Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan, dan KKPE (Kredit Ketahanan Pangan Energi). Hampir 44,36 persen rumah tangga penerima kredit usaha mendapatkan kredit usaha dari PNPM dan kurang dari 21 persen mendapatkan kredit usaha dari program koperasi, sementara penerima program bank selain KUR sebesar 18,97 persen.

8.4. Tindak Kejahatan

Selain bantuan kredit usaha, tingkat keamanan wilayah juga dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Tingginya persentase korban tindak kejahatan mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan.

Menurut data Susenas 2016, ada sekitar 1 persen penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara yang menjadi korban kejahatan selama Maret 2015 sampai dengan Februari 2016. Rendahnya angka kriminalitas di Kabupaten Minahasa Tenggara dimungkinkan karena telah efektifnya tim-tim khusus dari masing-masing Polsek di Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mengatasi keluhan masyarakat terkait tindakan kriminal di lingkungan sekitar. Pencapaian ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan mendekati 0 persen, karena mempertahankan suatu prestasi lebih berat dibandingkan dengan membangun.

<https://mitrakab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Alamat : Jl. Trans Sulawesi, Desa Teep,
Kecamatan Amurang Barat,
Minahasa Selatan 95955,
e-mail : bps7105@bps.go.id
Website : <https://minselkab.bps.go.id>
<https://mitrakab.bps.go.id>

